

**PANDANGAN *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO)  
SEBAGAI *AGENT CONTROL* DALAM TATA KELOLA APBD  
PROVINSI JAWA TIMUR 2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh:**

**FAIZUL KAMAL**

**NIM. I71219043**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
2023**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahurramanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Faizul Kamal

NIM : 171219043

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **Pandangan *Non Government Organization* sebagai *Agent Control* dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa Timur 2023**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 29 April 2023

Yang Menyatakan



Faizul Kamal

NIM. 171219043

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah meninjau dan memberikan arahan terhadap proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faizul Kamal

NIM : I71219043

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: **Pandangan *Non Government Organization* sebagai *Agent control* dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa Timur 2023**, Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut telah diperbaiki dengan baik dan siap diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 28 April 2023

Pembimbing



**Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.**  
**NIDN.16909071994032001**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh Faizul Kamal dengan judul : "PANDANGAN *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* SEBAGAI *AGENT CONTROL* DALAM TATA KELOLA APBD PROVINSI JAWA TIMUR 2023" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim Penguji Skripsi pada tanggal 7 September 2023.

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji I



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

Penguji II



Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002

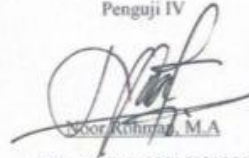
Penguji III



Holilah, S.Ag., M.Si

NIP. 197610182008012008

Penguji IV



Soor Khotimah, M.A

NIP. 198510192015031001

Surabaya, 7 September 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizul Kamal.....  
NIM : I71219043.....  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Politik.....  
E-mail address : kamalmehmed0@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PANDANGAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) SEBAGAI AGENT CONTROL DALAM TATA KELOLA APBD PROVINSI JAWA TIMUR 2023

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2024

Penulis

(Faizul Kamal)

## ABSTRACT

**Faizul Kamal, 2023.** *Pandangan Non Government Organization sebagai Agent Control dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa Timur 2023.* Studi Penelitian tentang NGO dan Tata Kelola APBD. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci :** Pandangan, Non Government Organization, FITRA JATIM, APBD

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis pandangan FITRA JATIM sebagai *Agent Control* dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa Timur 2023 serta Faktor Penghambat dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa Timur 2023. Dengan APBD menurut PERDA murni berjumlah lebih dari 30 Triliun serta Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang mempunyai *Middle Income* tinggi namun, tingkat kemiskinan masih tinggi, masih terdapat penyalahgunaan anggaran daerah yang tidak sesuai dengan prinsip penggunaannya. Hal ini menunjukkan masih terdapat persoalan yang perlu mendapat pengawasan dalam hal ini FITRA JATIM sebagai NGO yang mempunyai fokus terhadap anggaran melakukan usaha-usaha transparansi dan advokasi anggaran guna menghasilkan tata kelola APBD yang baik.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Power Cube* (Kubus Kekuasaan) Jhon Gaventa dimana FITRA JATIM dalam kekuasaan berada pada kekuasaan tak terlihat dan kekuasaan ruang yang diciptakan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah FITRA JATIM mempunyai posisi dan peranan dalam kekuasaan sebagai kekuasaan yang tak terlihat yang dimaksud adalah FITRA JATIM melakukan usaha membangun kesadaran dan berkontribusi menciptakan ruang-ruang untuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi Tata Kelola APBD Jatim 2023. FITRA JATIM memandang bahwa Transparansi antar Lembaga dalam Tata Kelola APBD kurang berjalan dengan baik, kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan APBD dan kurangnya komitmen serta keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur menjadi hambatan dan masalah dalam pandangan FITRA JATIM. Kemudian kurangnya transparansi serta komitmen dalam pelaksanaan Tata Kelola APBD menjadi faktor yang penghambat yang perlu diselesaikan. Beberapa hambatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jawa Timur muncul dari pihak internal, termasuk pemangku kepentingan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip pengelolaan APBD yang baik, minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai APBD, serta kurangnya transparansi antar lembaga yang berdampak pada proses pengawasan, pelaksanaan program, dan evaluasi.

## ABSTRAK

Faizul Kamal, 2023. "The Perspective of Non-Governmental Organizations as Agents of Control in the Governance of the East Java Provincial Budget (APBD) in 2023." A Research Study on NGOs and APBD Governance. Thesis for the Political Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Keywords:** Perspective, Non-Government Organization, FITRA JATIM, APBD

The problem addressed in this research is to analyze FITRA JATIM's perspective as a Control Agent in the Governance of the East Java Provincial Budget (APBD) in 2023, as well as the Inhibiting Factors in the Governance of APBD in East Java Province in 2023. The APBD, according to local regulations (PERDA), amounts to more than 30 trillion rupiahs. Despite being a region with a high middle-income level, East Java Province still faces a high poverty rate and experiences misappropriation of regional budgets that do not align with their intended purposes. This indicates that there are still issues that require oversight. In this context, FITRA JATIM, an NGO focused on budget transparency, engages in advocacy efforts to promote sound APBD governance.

The research methodology employed in this study is a qualitative and descriptive approach, using data collection techniques such as interviews and documentation. The theoretical framework used in this research is John Gaventa's Power Cube theory, which situates FITRA JATIM within the realm of invisible power and the spaces it creates.

The findings of this research indicate that FITRA JATIM plays a role in the realm of invisible power. This means that FITRA JATIM is engaged in efforts to raise awareness and contribute to creating spaces for community participation in monitoring the governance of the East Java Provincial Budget for 2023. FITRA JATIM perceives that transparency among institutions involved in APBD governance is lacking, there is a deficiency in accountability in APBD utilization, and there is a lack of government commitment and bias towards the welfare of the people in East Java, which serves as obstacles and issues in FITRA JATIM's perspective. Several challenges in managing the Regional Budget (APBD) in East Java Province arise from internal parties, including stakeholders. These challenges include a lack of commitment to good APBD management principles, insufficient education about the APBD to the public, and a lack of transparency among institutions, which impacts the supervision, implementation of programs, and evaluation processes.



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Konseptual.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b> .....	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kerangka Teori.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Pemilihan Subjek Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Teknik Keabsahan Data .....	42
G. Sistematika Pembahasan .....	43



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
B. Peran Non Government Organization sebagai Agent Control Dalam Tata Kelola APBD Jatim 2023 .....	54
1. Pandangan FITRA JATIM sebagai <i>Agent Control</i> dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa Timur 2023 .....	54
2. Posisi dan Peranan Fitra Jatim dalam Tinjauan Teori Power Cube.....	68
C. Pandangan FITRA Jatim tentang Faktor Penghambat dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jatim 2023 .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2023.....	6
Tabel 4.1 Struktur FITRA.....	50
Tabel 4.2 Pertumbuhan Belanja Daerah .....	58
Tabel 4.3 Belanja Hibah Provinsi Jawa Timur .....	62
Tabel 4.4 Kesimpulan Pandangan FITRA Jatim.....	64
Tabel 4.5 Kesimpulan Teori.....	78
Tabel 4.6 Kesimpulan Faktor Penghambat dan Solusi .....	87



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, P. D. (2019). Tata Kelola Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 26(1), 1-16.
- Farid, R. (2016). Pengaruh Tata Kelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 51-62.
- Mardiasmo, D. (2017). Otonomi dan Tata Kelola Keuangan Daerah. In Buku Pegangan Ilmu Keuangan Daerah (pp. 17-29). Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- SEKNAS FITRA ; <https://seknasfitra.org/perihal-2/>. Diakses pada tanggal 5 September 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), h.99.
- Dwiyanto Agus, Mewujudkan Good Governanca Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D.J.Mamesah, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal.20.
- UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1 butir ke 32.
- Halim Abdul dan Kusufi Syam, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hal.22
- PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pramono Hariadi, Yanuar E.Restianto dan Icuk Rangga Bawono, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2010, hal.11-12.
- Saragih, J.P. (2014). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta, Indonesia: P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI..
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, Volume 10(No. 1), Hlm. 73 – 96. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Wahyuniar (2017). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Husnaeni. (2022). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tamam, B.M. (2017). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten KulonProgo dalam upaya pengentasan kemiskinan (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta.
- Artanti, N.Y. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007 [Skripsi]. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Khuzaironi, M.C. (2015). Pengaruh Kebijaksanaan APBD dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah [Skripsi]. Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 18-34. P-ISSN 2086-4159, E-ISSN 2656-6648.
- Yeni, F. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan daerah dan Pengeluaran belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten SIAK Tahun 2006-2016 (Skripsi). Universitas Islam Riau.
- Reski, S. Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Kabupaten Soppeng.(Skripsi). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- John Gaventa, "Finding the Spaces for Change: Power Analysis", *IDS Buletin*, Volume 37, Number 6 (2006), 23.
- Chalik, A. *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Almasdi Syahza, *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021*, 2021.
- Smith Adrian.2006.*Metode Penelitian Manajemen Edisi 1*. Jakarta : Kencana.
- Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017)
- Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, *The Lancet*,

vol. 160 (Jambi: PUSAKA, 2017), [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2).

Sugiyono.2010. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Arbisanit. Swadaya Politik Masyarakat. (Jakarta:CV.Rajawali.1985). hlm. 77  
Subayono, organisasi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 101.

Ari Ganjar Hardiansah, Randi “Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Soisologi*, Vol. 1, No. 1, hal. 52 (Desember 2016)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers,2010) hal.212

Lisa Jordan dan Peter Van T, *Akuntabilitas LSM* (Jakarta: LP3ES, 2009), 12-13  
*Laporan Pertanggungjawaban Seknas FITRA 2008-2011*

[https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/12/3.-Renstra-final\\_rev18Juli2012-pdf.pdf](https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/12/3.-Renstra-final_rev18Juli2012-pdf.pdf). Diakses pada 28 September 2023.

STATUTA FITRA. Musyawarah Nasional. Kebumen.

SEKNAS FITRA ; <https://seknasfitra.org/perihal-2/>. Diakses pada tanggal 27 September 2023.

Soleh Chabib. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung:Fokus Media, hal 70.

Edward H. Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol XLII No. 1, Tahun 2016.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Puan Maharani: APBN 2023 Perlu Antisipasi Berbagai Dinamika Global;  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39731/t/Puan%20Maharani:%20APBN%202023%20Perlu%20Antisipasi%20Berbagai%20Dinamika%20Global>.

DPRD – Pemprov Jatim Sahkan P-APBD 2023 ;  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dprd-pemprov-jatim-sahkan-p-apbd-2023>.

STATUTA FITRA ; <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2023/06/New-STATUTA-FITRA-Munas-23-25-Mei-2023-Kebumen.pdf>.

Program FITRA ; <https://seknasfitra.org/budget-literacy-forum/>.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Divonis 9 Tahun Bui Kasus Dana Hibah ;  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230926183115-12-1004083/wakil-ketua-dprd-jatim-sahat-divonis-9-tahun-bui-kasus-dana-hibah>.

BUKA MUSRENBANG 2023, GUBERNUR KHOFIFAH PAPARKAN TUJUH PRIORITAS PEMBANGUNAN JATIM ;

[https://jatimprov.go.id/index.php/berita/buka-musrenbang-2023-gubernur-khofifah-paparkan-tujuh-prioritas-pembangunan-jatim\\_mumd5087E7sang](https://jatimprov.go.id/index.php/berita/buka-musrenbang-2023-gubernur-khofifah-paparkan-tujuh-prioritas-pembangunan-jatim_mumd5087E7sang).

Rencana Strategis FITRA ; [https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/12/3.-Renstra-final\\_rev18Juli2012-pdf.pdf](https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/12/3.-Renstra-final_rev18Juli2012-pdf.pdf).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A